

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat adil dan makmur. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, mutlak perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan, seperti halnya pembangunan di bidang ketenagakerjaan, baik tenaga kerja swasta maupun pegawai negeri sipil.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Sejauh ini masyarakat menilai kinerja para penggerak roda birokrasi dari pusat sampai daerah masih buruk atau masih dinilai belum berubah. Dimata publik, kinerja, mentalitas, dan disiplin pegawai negeri sipil masih jauh dari mencukupi, kekuasaan terletak dalam sistem dan keteladanaan atasan.

Dalam ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditegaskan bahwa pembangunan aparatur diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan seluruh tatanan administrasi pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme termasuk peningkatan kemampuan pegawai negeri sipil, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya.

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai, maka perlu dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan jabatan bagi para pegawai negeri sipil, dimana hal tersebut sebagai sarana penunjang peningkatan prestasi kerja pegawai. Pendidikan dan latihan merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan mutu profesionalisme, kesetiaan, pengabdian, dan pengembangan wawasan serta pembinaan karir aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat di sini termasuk di dalamnya adalah aparatur pemerintah yang lain yaitu pegawai negeri sipil yang mengabdikan dan melayani masyarakat.

Pembangunan bangsa tidak lepas dari peranan aparatur pemerintah yang berkualitas, untuk lebih meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektifitas seluruh tatanan administrasi pemerintah dan pembangunan, termasuk kemampuan, pengabdian, keteladanan dan kesejahteraan aparatnya serta untuk meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka perlu dilaksanakan kemampuan manajemen yang modern dan pendidikan dan pelatihan, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai. Dalam hal ini adalah pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil.

Pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil sangat besar peranannya seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada Pasal 31 ayat (1) yang